

BAB IV

PILIHAN RASIONAL ETHIOPIA

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai keputusan Ethiopia meratifikasi *Cooperative Framework Agreement (CFA)* yang merupakan keputusan atas dasar aktor rasional dalam mencapai sebuah kepentingan ekonomi dan kepentingan politiknya. Dimana atas pertimbangan rasional, Ethiopia memperhitungkan untung rugi yang akan diterima jika memutuskan untuk meratifikasai CFA tersebut. Sehingga akan dijelaskan beberapa keuntungan serta kerugian Ethiopia dalam mencapai kepentingannya melalui keputusan rasionalnya untuk meratifikasi CFA.

A. Kepentingan Ekonomi

Ethiopia merupakan negara yang dilanda kelaparan dan kekeringan dengan populasi lebih dari 96 juta penduduk. Meskipun begitu, perekonomian Ethiopia dapat dikatakan meningkat Dimana Ethiopia sebagai negara yang sempat dirusak oleh perang sipil dan kemiskina parah sampai awal 1990an, telah berhasil merubah negaranya secara signifikan (Nicol, 2016, hal. 557). Meskipun begitu, Ethiopia tetap saja belum bisa terhindar dari bencana kelaparan dan kekeringan yang terjadi hampir setiap tahun. Selain itu, Ethiopia mengalami kekurangan energi listrik yang pastinya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Dengan pemikiran tersebut, Ethiopia memprakarsai proyek bendungan raksasa yang bernama *Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD)*. Bendungan raksasa yang dipercayakan dapat menghasilkan produksi listrik yang sangat besar. Namun, rencana Ethiopia untuk membangun proyek GERD mendapat penolakan keras dari Mesir. Mesir menganggap bahwa proyek tersebut hanya akan mempengaruhi jumlah air Sungai Nil yang masuk ke Mesir. Terlebih lagi Sungai Nil sebagai sumber kehidupan Mesir

yang sebagian besar negaranya dipenuhi dengan gurun pasir yang kering.

Mesir dan Sudan pun pernah merencanakan untuk mengambil tindakan militer melawan Ethiopia untuk melindungi kepentingan mereka di Sungai Nil pada tahun 2010. Seorang pejabat Mesir tingkat tinggi yang dekat dengan Presiden Mubarak menuliskan tentang rencana sabotase proyek bendungan yang akan direncanakan Ethiopia. Dimana WikiLeaks menerbitkan email yang diperoleh dari Strategic Forecasting, Inc., (STRATFOR) yang berisi percakapan tersebut, yang berbunyi:

“ The only country that is not cooperating is Ethiopia. We are continuing [...] the diplomatic approach. Yes, we are discussing military cooperation with Sudan.... If it comes to a crisis, we will send a jet to bomb the dam and come back in one day, simple as that. Or we can send our special forces in to block/sabotage the dam.... Look back to an operation Egypt did in the mid-late 1970s, I think 1976, when Ethiopia was trying to build a large dam. We blew up the equipment while it was traveling by sea to Ethiopia (Abebe, 2014, hal. 33).”

Meskipun mendapat penolakan keras dan berbagai ancaman dari Mesir, Ethiopia tidak menghiraukannya dan tetap memutuskan untuk membangun proyek GERD. Ethiopia akhirnya secara resmi mengumumkan untuk mendirikan proyek tersebut pada tahun 2011, yang diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Meles Zenawi. GERD tersebut dipastikan akan menjadi bendungan raksasa terbesar di Afrika senilai \$ 4,2 miliar dengan tujuan menciptakan salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia (Abebe, 2014, hal. 32).

Mendengar keputusan Ethiopia yang tidak mengindahkan ancaman Mesir, Mesir semakin khawatir terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh bendungan tersebut. Mesir pun berusaha mengagalkannya dengan berbagai macam ancaman dengan konsekuensi yang berat bagi Ethiopia. Karena dapat dikatakan bahwa sejak zaman Mesir Kuno sampai sekarang,

sungai Nil telah menonjol dalam sejarah dan budaya Mesir, dan ini sangat berkontribusi pada identitas Mesir. Sehingga Sungai Nil paling jelas dikaitkan dengan Mesir. Sungai Nil menyediakan 96 persen air tawar terbaru Mesir dan Lembah Nil menampung 98 persen dari 85 juta penduduk Mesir (Abebe, 2014, hal. 31). Sementara faktanya bahwa Sungai Nil Biru yang menyumbang lebih banyak air untuk Mesir, bersumber di Dataran Tinggi Ethiopia di Danau Tana.

Meskipun Sungai Nil Biru bersumber di Ethiopia, namun Ethiopia sebagai negara hulu tidak dapat memanfaatkan Sungai Nil Biru semaksimal mungkin untuk alasan ekonomi, politik, dan geostrategis yang beragam. Ethiopia hanya mendapatkan sekitar dibawah 1% dari Sungai Nil Biru yang sebenarnya menyediakan 68% sumber air yang tersedia untuk Ethiopia (Abebe, 2014, hal. 31).

Hal tersebut tidak lain dikarenakan Perjanjian 1929 dan 1959 yang menjadi status *quo* bagi Mesir untuk membatasi Ethiopia memanfaatkan Sungai Nil, khususnya Sungai Nil Biru. Sehingga Ethiopia masih termasuk ke dalam salah satu negara terbelakang, meski dekat dengan sumber air Sungai Nil Biru. Terlebih lagi perekonomian Ethiopia sebagian besar bergantung pada pertanian, yang tentu sangat bergantung pada sumber air Sungai Nil.

Presiden Mesir Abdel-Fattah al-Sisi pun mengungkapkan bahwa:

“No one can touch Egypt’s share of Nile water” and the Nile water share is a “matter of life or death” (Egypt’s Sisi Dials Up anti-Ethiopia Dam Rhetoric, 2017).”

Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah peringatan keras, yang dipandang sebagai ancaman militer dengan mengatakan bahwa Mesir memiliki kekuatan yang mampu melindungi keamanan nasional dan air Sungai Nil merupakan masalah keamanan nasional. Dimana menurut Perjanjian Anglo-Mesir 1929, berisi bahwa segala bentuk proyek yang akan dibangun di sekitar Sungai Nil haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari

Mesir dan tidak ada satu proyek pun yang dapat mempengaruhi debit air Sungai Nil yang mengalir di Mesir.

Selain khawatir akan mengurangi pasokan air di Mesir, Mesir juga mempertanyakan legalitas atas pembangunan proyek bendungan raksasa tersebut. Dikarenakan Ethiopia membangun sebuah proyek di wilayah perairan yang belum dipetakan dalam hukum internasional. Sehingga Mesir yang mengadopsi perjanjian lama, yang berisi bahwa segala bentuk proyek di sekitar Sungai Nil haruslah atas ijin Mesir, tentu menjadikan proyek tersebut ilegal di atas perjanjian Anglo-Mesir 1929 dan 1959 tersebut. Mesir menganggap bahwa Ethiopia telah melanggar Perjanjian 1929 dan 1959 yang sebenarnya perjanjian tersebut belum memiliki dasar hukum yang sah dikarenakan hanya dibentuk atas dasar kesepakatan Mesir dan juga Sudan tanpa melibatkan negara riparian lainnya, termasuk Ethiopia. Dimana terlihat bawah Ethiopia memiliki air, sedangkan Mesir memiliki power. Sehingga Mesir memiliki peran utama dalam penggunaan Sungai Nil Biru.

Ethiopia pun menyadari bahwa segala bentuk penolakan dan ancaman yang terus diberikan oleh negara hilir, khususnya Mesir, akan menjadi hambatan bagi Ethiopia dalam meneruskan proyeknya tersebut. Terlebih lagi Mesir memiliki kekuatan Politik atas status *quo* terhadap kepemilikan Sungai Nil yang berdasarkan Perjanjian 1929 dan 1959 serta dukungan ekonomi yang dimiliki oleh Mesir. Sehingga, Ethiopia yang tidak memiliki kekuatan politik apapun dalam mendukung proyek GERD, serta lemahnya kekuatan ekonomi dan militer Ethiopia, membuat Ethiopia tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk dapat menentang penolakan negara hilir. Dimana terlihat bawah Ethiopia memiliki air, sedangkan Mesir memiliki power. Sehingga Mesir memiliki peran utama dalam penggunaan Sungai Nil Biru.

Dapat dikatakan bahwa pembangunan proyek GERD yang dilakukan oleh Ethiopia tidak didasarkan pada kerangka atau peraturan resmi yang sangat melemahkan posisi Ethiopia. Akhirnya, guna memperlancar pembangunan proyek GERD, pada 13 Juni 2013, Ethiopia memutuskan sebagai negara pertama yang meratifikasi *Cooperative Framework Agreement*

(CFA). Dimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa CFA merupakan kerangka permanen pertama yang dibentuk dalam mengatur pengelolaan Sungai Nil. Keputusan Ethiopia meratifikasai CFA tidak lain atas dasar pertimbangan rasional demi mencapai kepentingannya, khususnya kepentingan Ekonomi. Dengan meratifikasi CFA, Ethiopia berharap dapat meningkatkan upaya tawar menawar dan mendorong Mesir untuk lebih kooperatif lagi dalam proyek GERD tersebut. Dikarenakan CFA akan membentuk sebuah rezim hukum baru dan membuka pintu untuk semua negara di hulu guna meyakinkan pemodal internasional untuk meminjamkan proyek di Sungai Nil.

Selain itu, CFA memberikan hak Ethiopia atas proyek bendungannya tersebut. Dimana dalam CFA dijelaskan bahwa masing-masing negara bagian Nil, berhak mendapatkan bagian yang masuk adil dalam penggunaan sumber daya air yang menguntungkan dari sistem Sungai Nil. Dimana sebelumnya, air Sungai Nil Biru yang berada di Ethiopia mampu menghasilkan 86% aliran dan Ethiopia hanya menerima tidak lebih dari 1%. Tentu terlihat jelas ketidakadilan yang sangat dirasakan oleh Ethiopia. Hubungan Ethiopia dengan Mesir pun semakin memanas ketika Ethiopia meratifikasi CFA. Berikut gambaran proyek bendungan yang turut menjadi perdebatan.



Gambar 4.1 Proyek *Grand Ethiopia Renainnsansce Dam* (GERD)

Proyek *Grand Ethiopia Renainnsansce Dam* (GERD) merupakan proyek bendungan Ethiopia yang terletak sekitar 20 kilometer dari perbatasan Sudan (Yihdego, Rieu-Clarke, & Cascão, 2018) dan berada di posisi yang strategis. Proyek GERD tersebut akan menampung sebanyak 74 miliar meter kubik air Sungai Nil Biru serta menghasilkan tenaga listrik

sebesar 6000 Megawatt yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan energi dalam negeri yang kronis, membantu rumah tangga negara (terutama yang berada di daerah pedesaan) beralih ke bentuk energi yang lebih bersih dan memungkinkan pemerintah memperoleh devisa melalui ekspor listrik ke negara lain di wilayah ini. Dimana Ethiopia hanya memiliki kapasitas produksi listrik sebesar 3.200 megawatt, dan hanya mengkonsumsi listrik sebesar 65 kilowatt jam yang dimana rata-rata penggunaan listrik dunia sekitar 3.104 kilowatt jam (Hicks, 2017). Energi alternatif lain yang diandalkan Ethiopia yaitu kayu, kotoran dan biomassa lainnya. Hal tersebut membuat Ethiopia termasuk ke dalam salah satu negara yang mengkonsumsi listrik terendah di dunia.

Sehingga, proyek GERD tersebut selain membantu Ethiopia dalam memperbaiki kekurangan energi dalam negeri, Ethiopia juga diperkirakan akan memperoleh \$1 miliar setahun dari hasil ekspor listrik. Yang tentu dapat menjadikan Ethiopia sebagai pengeksport listrik terbesar di Afrika. Pemasukan dana yang cukup besar juga sangatlah membantu Ethiopia dalam memperbaiki perekonomian untuk lebih maju lagi (Hicks, 2017). Dimana GERD yang merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Afrika memiliki volume beton dam 10,2 juta m³ akan menjadi bendungan volume beton kompak terbesar di dunia (Egypt's Sisi Dials Up anti-Ethiopia Dam Rhetoric, 2017).

Namun, Mesir yang mengkhawatirkan dampak buruk bendungan tersebut terhadap jumlah air di Mesir, dibantah oleh Ethiopia. Ethiopia meyakinkan Mesir bahwa proyek bendungan yang akan dibangunnya tidak akan mempengaruhi jumlah debit air di setiap negara bagina Sungai Nil. Hanya memberi keuntungan bagi Ethiopia saja. Melainkan Proyek tersebut justru memberikan banyak dampak positif serta keuntungan bagi perekonomian di negara sekitarnya, khususnya bagi Mesir dan Sudan. Meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun agar implikasi penuh bendungan dapat dirasakan.

Secara ekonomi, bendungan akan memiliki dampak besar pada ketersediaan energi di Sungai Nil bagian Timur. Yang tentunya dapat meningkatkan tenaga air bagi Ethiopia, Sudan maupun Mesir. Dimana Sudan sebagai negara tetangga Ethiopia dapat merasakan keuntungan langsung dan keuntungan jangka panjang bagi Mesir. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa GERD dapat memberikan peluang kerja sama dan perdagangan ekonomi dan investasi di masa depan antara Ethiopia, Sudan dan Mesir. Serta manfaat lainnya yang dapat dirasakan oleh negara hulu (Nicol, 2016, hal. 566-567).

Dalam proses pembangunan proyek GERD, Ethiopia telah mendanai proyek tersebut dari sumber keuangannya sendiri. Ethiopia memilih menjual obligasi kepada warga di dalam maupun luar negeri. Dimana Ethiopia meminta agar pegawai pemerintah menyumbangkan gajinya untuk pembelian obligasi. Meskipun gaji pegawai pemerintah cukup rendah dengan biaya hidup yang cukup tinggi, pemerintah Ethiopia tetap meyakinkan bahwa hal tersebut sebagai pertunjukan patriotisme sebagai warga negara (M & Deressa, 2013).

Namun, tingkat perekonomian Ethiopia yang masih rendah, tidak memungkinkan Ethiopia untuk mampu mendanai proyek besar tersebut tanpa bantuan pihak asing. Dimana China sebagai negara yang mengalami peningkatan ekonomi yang cukup besar telah meminjamkan dana sebesar \$1 miliar untuk membangun jalur transmisi yang menghubungkan ibukotanya Addis Ababa dengan bendungan tenaga air terbesar Afrika yang dibangun di atas Sungai Nil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penandatanganan kesepakatan antara Utilitas Listrik China Electric Power Equipment and Technology Co. Ltd dan Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) yang akan membiayai dan membangun jalur transmisi 400 kilovolt dan 500 kilovolt untuk menghubungkan bendungan raksasa ke ibukota Ethiopia (Maasho, 2013). Dikarenakan China memiliki peran utama dalam pemberian bantuan dana di hampir setiap proyek di Afrika. China juga telah memberikan beberapa

bantuan dana sebelumnya dalam proyek-proyek Ethiopia yang lainnya.

Sudan yang semula ikut menolak proyek tersebut, mulai mendukung Ethiopia. beberapa bulan setelah Ethiopia menyetujui ratifikasi CFA, tepatnya pada bulan Desember 2013, Sudan menyatakan dukungan penuhnya terhadap proyek GERD meskipun Sudan masih belum bisa menerima CFA. Sehingga Mesir semakin memiliki posisi yang lemah. Dimana semula Sudan dan Mesir berkoalisi untuk sepakat membatalkan proyek GERD tersebut, justru kini Sudan melanggar barisannya dengan Mesir.

Sudan kini telah memiliki kesepakatan dengan Ethiopia dalam kerja sama jual beli listrik. Ethiopia pun telah menawarkan daya beli Sudan sebesar 50 sen per kilowatt, yang jauh lebih kecil daripada biaya produksi untuk kilowatt di Sudan. Selain itu, beberapa negara lainnya juga turut menandatangani beberapa perjanjian jual beli listrik, seperti Djibouti, Kenya, Rwanda dan Tanzania (Goshu, 2017). Dan bisa dikatakan bahwa perselisihan mengenai proyek bendungan tersebut mulai mendapatkan titik terang. Ditandai dengan penandatanganan sebuah deklarasi prinsip-prinsip mengenai proyek bendungan yang menyetujui pembangunan bendungan tersebut namun meminta agar penelitian teknis untuk menjaga kuota air dari tiga negara bagian riparian oleh Sudan, Mesir dan Ethiopia (Sudan Tribune, 2017) .

Posisi Mesir semakin lemah dan posisi Ethiopia semakin kuat. Semakin banyak negara yang kini turut mendukung proyek GERD terlebih lagi Ethiopia telah memiliki kekuatan hukum yang resmi. Akhirnya setelah menjalani proses negosiasi yang cukup panjang, Ethiopia berhasil membuat kesepakatan dengan negara-negara tetangganya, yaitu Sudan dan Mesir pada Maret 2015. Dimana ketiga negara tersebut menyepakati sebuah Agreement on Declaration of Principles on the GERD (DoP), yaitu Persetujuan mengenai Deklarasi

Prinsip-Prinsip tentang GERD. Kesepakatan tersebut dilakukan oleh masing-masing kepala negara dari ketiga negara tersebut dan ditanda tangani pada Desember 2015. Inti dari kesepakatan tersebut ialah menyetujui bahwa GERD memberikan manfaat bagi negara-negara sekitarnya, tidak hanya keuntungan bagi Ethiopia. Serta ujuan GERD adalah untuk pembangkit tenaga listrik yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, promosi kerjasama lintas batas dan integrasi regional (Salman, *The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The impasse is breakable!*, 2017).

Sebenarnya, proyek GERD tersebut bukanlah proyek bendungan yang pertama kali dibangun oleh Ethiopia. Sebelumnya Ethiopia sempat membangun beberapa bendungan, namun hanyalah bendungan kecil. Dan GERD ini yang merupakan satu-satunya bendungan terbesar yang pernah dibangun oleh Ethiopia. Sehingga tidak heran bahwa bendungan kali ini mendapat penolakan keras dari Mesir. Bendungan pertama yang dibangun oleh Ethiopia yaitu Fincha Dam yang selesai dikerjakajn pada tahun 1973 untuk pembangkit tenaga air. Selanjutnya yaitu proyek Tis Abbay di Danau Tana yang juga untuk pembangkit tenaga air (Yihdego, Rieu-Clarke, & Cascão, 2018) dan beberapa bendungan kecil lainnya yang tidak memiliki pengaruh besar.

Sehingga dapat dijelaskan kembali bahwa keputusan Ethiopia meratifikasi CFA tidak lain untuk melancarkan pembangunan proyek GERD guna memperbaiki perekonomian Ethiopia keluar dari zona kemiskinan. Dengan adanya CFA, pemerintah Ethiopia menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk mengembangkan bagiannya dari Lembah Sungai Nil Biru, yang mengubah rencana lama menjadi kenyataan (Nicol, 2016, hal. 559) . Sehingga kepentingan ekonomi Ethiopia dapat terealisasikan. Karena untuk keluar dari kemiskinan yang masih melekat di Ethiopia, Ethiopia harus dapat memanfaatkan

sumber daya alamnya semaksimal mungkin. Dikarenakan Ethiopia dianugerahkan sumber Air Sungai Nil Biru yang jika dimanfaatkan dengan maksimal, dapat membantu Ethiopia keluar dari lingkaran kemiskinan. Salah satunya yaitu bendungan raksasa yang sedang dalam proses pembangunan tersebut. Bendungan itu merupakan salah satu contoh bagaimana Ethiopia benar-benar memanfaatkan sumber daya alam yang berada di negaranya.

Dan dapat disimpulkan bahwa keputusan Ethiopia untuk meratifikasi CFA pada tahun 2013 merupakan keputusan yang tepat. Keputusan yang sangat memberikan keuntungan bagi Ethiopia, guna melancarkan kepentingan ekonominya dalam hal pembangunan bendungan raksasa, yaitu GERD. Sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai keputusan yang benar-benar rasional untuk tetap dilaksanakan oleh Ethiopia.

B. Kepentingan Politik

Keputusan Ethiopia meratifikasi CFA pada tahun 2013 memberikan keuntungan bagi Ethiopia dalam mencapai kepentingan politiknya. Dimana Ethiopia dapat membuka peluang untuk menggantikan Perjanjian 1929 dan 1959 dengan kerangka hukum resmi yang baru yang tentu dapat memberikan keadilan bagi negara-negara riparian lainnya, khususnya Ethiopia. Terlebih lagi Ethiopia lah negara yang paling dirugikan atas perjanjian lama tersebut. Ethiopia sebagai negara yang dekat dengan sumber Sungai Nil Biru tidak memiliki keleluasaan dalam pemanfaatannya.

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Perjanjian 1929 merupakan perjanjian yang dibuat oleh Mesir dan juga Inggris pada masa kolonial Inggris yang memberikan hak penuh Mesir atas Sungai Nil. Sedangkan Perjanjian 1959 merupakan perjanjian bilateral antara Mesir dan Sudan yang memberikan kedua negara tersebut keuntungan lebih dalam pengelolaan Sungai Nil, meskipun Mesir tetap mendapatkan jumlah air yang lebih banyak dibanding Sudan. Sedangkan sebagian besar air Sungai Nil yang mengalir ke Mesir berasal dari Ethiopia.

Secara tidak langsung, Ethiopia telah di jajah oleh Mesir dengan menguasai Sungai Nil Biru tersebut. Mesir memiliki hak yang lebih besar dibanding Ethiopia. Mesir selalu menyatakan hak veto nya atas sungai tersebut menurut Perjanjian 1929 dan 1959. Sedangkan perjanjian tersebut tidak melibatkan Ethiopia yang sebagian besar jumlah air yang di klaim Mesir berasal dari Ethiopia. Yang tentu menjadikan perjanjian tersebut tidak dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum yang lemah. Perjanjian tersebut juga mempersempit ruang gerak Ethiopia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu sumber air Sungai Nil Biru. Mesir mempergunakan perjanjian lama untuk terus menguasai Sungai Nil tersebut. Ethiopia juga tetap menyangkal bahwa dia lah negara yang memiliki hak penuh atas Sungai Nil dan Sungai Nil merupakan sumber kehidupan Mesir yang tidak ada satu negara yang boleh mengusiknya.

Sehingga dengan meratifikasi CFA, berarti Ethiopia dapat mengimplementasikan CFA tersebut dalam negaranya serta memiliki hak atas Sungai Nil Biru di atas dasar hukum yang resmi. Meskipun pada saat itu hanya Ethiopia saja yang baru meratifikasi, namun CFA tetap dapat berlaku dan memang hanya bagi negara yang meratifikasinya. Meskipun begitu, keputusan Ethiopia tersebut menjadi langkah awal bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak Ethiopia.

Di tahun yang sama, sebulan setelah Ethiopia meratifikasi CFA, Rwanda pun menjadi negara kedua yang meratifikasi CFA mengikuti jejak Ethiopia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Tanzania ikut meratifikasi CFA. Selain itu, seperti yang dilansir media, bahwa Duta Besar Uganda dan Burundi yang berada di Ethiopia mengungkapkan bahwa negara mereka akan meratifikasi CFA dan akan menjadikan kerangka tersebut sebagai hukum domestik mereka, sama seperti yang dilakukan oleh Ethiopia. Duta Besar Uganda juga menyatakan bahwa organ legislatif akan menggabungkan CFA sebagai bagian dari undang-undang Uganda karena kerangka tersebut merupakan alat kunci untuk memastikan

manfaat sosio-ekonomi negara tersebut. Mereka menyadari bahwa CFA merupakan sebuah kerangka baru yang memiliki peran penting serta sangat diperlukan guna membawa perkembangan negara mereka masing-masing (Getachew, 2014).

Semakin banyak negara yang mengikuti jejak Ethiopia untuk meratifikasi CFA, semakin besar peluang untuk menghapus perjanjian 1929 dan 1959. Dimana jika terdapat 6 negara yang telah meratifikasi CFA, maka CFA akan diberlakukan sebagai kerangka hukum permanen dalam pengaturan Sungai Nil yang tentu menjadikan Perjanjian 1929 dan 1959 tidak berlaku lagi dan kekuatan hukum atas perjanjian tersebut akan semakin lemah. Status quo Mesir atas Sungai Nil pun juga tidak akan diakui dan Mesir harus memberikan hak yang adil dalam pemanfaatan Sungai Nil. Sehingga konflik atas pengelolaan Sungai Nil yang berkepanjangan tersebut akan sedikit mendapatkan titik terang.

Keputusan negara-negara lain untuk meratifikasi CFA tidak lepas dari usaha Ethiopia itu sendiri. Ethiopia sebagai salah satu negara hulu yang mendorong hampir seluruh negara di hulu untuk menandatangani CFA. Ethiopia mencoba membawa aliansi hulu untuk lebih maju ke depan dan memperjuangkan hak mereka atas penggunaan Sungai Nil. Ethiopia menjadi teladan bagi negara-negara hulu.

Sikap tegas Ethiopia tentu memperlihatkan bagaimana kekuatan tawar-menawar Ethiopia meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Yang tentu memperkuat posisi politik Ethiopia sebagai anggota NBI serta meningkatkan eksistensi Ethiopia sebagai negara yang mampu bangkit dari konflik perbatasan yang berkepanjangan dengan Eriteria. Sehingga Ethiopia dianggap sebagai pemimpin blok hulu yang sangat berpengaruh. Dimana Ethiopia mampu mengajak negara-negara riparian lainnya untuk turut meratifikasi CFA. Kemajuan dan rasa percaya diri yang diperlihatkan oleh Ethiopia serta peran aktifnya dalam memperjuangkan CFA, membuat Mesir menjadi lebih khawatir. Sebelumnya, Mesir

telah mencoba untuk melobi negara-negara riparian untuk menyetujui adanya negosiasi ulang terhadap kerangka CFA. Mesir mendatangi beberapa negara, seperti Rwanda dan Tanzania. Namun, pada kenyataannya kedua negara tersebut justru ikut meratifikasi CFA.

Sehingga keputusan Ethiopia meratifikasi CFA merupakan keputusan yang tepat yang benar-benar berdasarkan pemikiran yang rasional. Jika kuota 6 negara telah terpenuhi untuk meratifikasi CFA dan CFA akan berlaku bagi negara-negara riparian lainnya, maka dapat dikatakan bahwa kesuksesan CFA tersebut tidak lepas dari peran utama Ethiopia. Ethiopia sebagai negara yang membuka peluang kesuksesan CFA tersebut. Yang tentu dapat meningkatkan eksistensi Ethiopia dalam keanggotaan NBI serta mencerminkan kekuatan politik Ethiopia yang semakin meningkat.

